

MOMENTUM “ISLAH” HMI DALAM KONGRES XXII DI PROVINSI JAMBI 1999

Irwan Aditama, Irhas Fansuri Mursal, Gusmira Wita
Mahasiswa Pasca Sarjana Departemen Sejarah Universitas Andalas,
Dosen Prodi Ilmu Sejarah UNJA, Departemen Sosiologi UNP
aditamairwan04@gmail.com, irhasfansuri@gmail.com, gusmira123@gmail.com

ABSTRACT

During the New Order era, a single principle policy was established, in which all organizations were based on Pancasila. This resulted in a division within the HMI organization. The peak of the split was at the HMI Congress which was the highest forum in the HMI statutes and bylaws. In 1986 the HMI Congress in Padang, HMI was split into two, namely Hmi DIPO which followed a single principle and MPO which maintained Islamic principles. In 1998 the New Order regime ended at the insistence of students and the people with demands for "Reformation" which resulted in Suharto's resignation. So that this becomes the momentum for the Islah organization of the HMI which was agreed to take place in Jambi. This research aims to analyze the implementation of the HMI congress as a momentum for the dualism of Islam that was already taking place in the New Order. The author uses a historical research method which consists of 4 stages: heuristics, source criticism, interpretation and historiography. The results of this study discuss the desire for reconciliation to become an agreement in the congress forum. The Congress also gave birth to several ideas, ideas, recommendations on the reform agenda.

Keywords: XXII Congress, Islah, Jambi Branch of HMI

ABSTRAK

Pada masa Orde Baru pada ditetapkan kebijakan azaz tunggal, dimana seluruh organisasi berazaskan Pancasila. Sehingga mengakibatkan perpecahan ditubuh Organisasi HMI. Puncak perpecahan pada Konggres HMI yang merupakan forum tertinggi dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HMI. Pada Tahun 1986 Kongres HMI di Padang, HMI terpecah menjadi dua yaitu Hmi DIPO yang ikut dengan azaz tunggal dan MPO yang mempertahankan azaz Islam. Pada tahun 1998 rezim orde baru berakhir atas desakan mahasiswa dan rakyat dengan tuntutan “Reformasi” yang mengakibatkan Suharto mengundurkan diri. Sehingga ini menjadi momentum Islah organisasi HMI yang dimana disepakati berlangsung di Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk dialektika pelaksanaan Kongres Hmi sebagai momentum islah dualisme yang sudah berlangsung pada orde baru Penulis menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri atas 4 tahapan yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian ini membahas tentang keinginan islah menjadi kesepakatan dalam forum Kongres. Kongres juga melahirkan beberapa ide, gagasan, rekomendasi dalam agenda reformasi.

Kata Kunci: Kongres XXII, Islah, HMI Cabang Jambi

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Organisasi adalah wadah aktualisasi dan pengembangan diri para anggotanya. Dalam konteks pendidikan, organisasi menyumbang banyak hal dalam rangka turut serta mewujudkan tujuan pendidikan tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah menjaga dan memproduksi nilai-nilai moral masyarakat yang biasanya diemban oleh pendidikan. Di era globalisasi ini yang disertai dinamika pertumbuhan budaya dan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan persaingan dalam berbagai hal, baik itu dalam bidang ideologi, ekonomi, maupun kemasyarakatan. (Al-Ayubi, 2015, hlm 1).

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengalami pergolakan di internal yang muncul pada tahun 1986. Pergolakan itu berkaitan dengan kebijakan pemerintah Orde Baru tentang azas tunggal Pancasila yang ditetapkan bagi seluruh organisasi. Kebijakan pemerintah tersebut mendapatkan respon beragam dari berbagai ormas Islam, termasuk HMI yang sejak lahir menjadikan Islam sebagai azas organisasinya. (Wawancara dengan E.Andri). Perbedaan dalam merespon azas tunggal Pancasila dikalangan internal HMI menjadi salah satu faktor yang mendahului terjadinya konflik internal HMI. Akhirnya pada saat itu HMI terpecah menjadi dua, yaitu: HMI DIPO yang menerima Pancasila sebagai asas untuk menyelamatkan organisasi agar nantinya tidak dibubarkan oleh pemerintah, dan kelompok kecil yang menamakan diri HMI MPO yang tetap bersikukuh mempertahankan Islam sebagai azas organisasi dengan alasan bahwa sanya HMI ini adalah organisasi mahasiswa Islam sudah seharusnya berazaskan Islam. Semakin memburuknya kondisi internal HMI adalah ketika keduanya mengklaim sebagai pewaris HMI yang sah.

Pergolakan diinternal HMI terjadi selama kurun waktu 1986-1998 (akhir dari pemerintahan Orde Baru). Namun, pada saat runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada Mei 1998 dengan mundurnya Soeharto sebagai presiden Indonesia. Sehingga menimbulkan pergolakan diantara masyarakat maupun organisasi kemahasiswaan tanpa terkecuali Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Himpunan Mahasiswa Islam mengalami imbas transisi dari pemerintahan Orba ke reformasi. Imbas terbesar adalah kembalinya Islam sebagai azas HMI. Penetapan azas ini dilaksanakan pada saat kongres XXII di Kota Jambi pada 03 Desember 1999 di gedung pemuda, bertepatan ditunjuknya HMI Cabang Jambi sebagai tuan rumah kongres.

Gagasan mengenai Islam sebagai azas selalu disuarakan di Kongres HMI setiap tahunnya. Namun selalu gagal dikarenakan masih kuatnya pemerintahan Orde baru. Pada Kongres XXII di Jambi akhirnya HMI DIPO kembali berazaskan Islam. Walaupun HMI masih mengalali dualisme secara struktur yaitu HMI DIPO dan HMI MPO. Kongres HMI selalu mengalami dinamika baik secara internal maupun eksternal tanpa terkecuali kongres XXII di Jambi. (Wawancara dengan Sanusi, 2019). Dinamika ini dimulai pada saat penentuan tuan rumah, calon tuan rumah kongres XXII diantaranya HMI Cabang Balikpapan, Mataram, Makassar, dan Jambi menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah Kongres. Peran dari Badko HMI Sumbagsel, HMI cabang se-Sumatera, pengurus besar HMI Aswan Zahari (perwakilan pengurus HMI dari Jambi) dan Elfy Andri (Sekretaris Pleno 3 HMI) yang pada saat itu pelaksanaan pleno 3 pengurus besar HMI dilaksanakan di daerah Puncak Bogor yang dipimpin langsung oleh ketua umum HMI Anas Urbaningrum, Akhirnya HMI Cabang Jambi ditunjuk sebagai tuan rumah kongres XXII. (Wawancara dengan E.Andri. 2019)

Menelisik dari sejarah, pada tahun 1986 pada saat ditetapkannya azas tunggal oleh pemerintahan Orde Baru. Jambi merupakan salah satu daerah pertama yang menerima secara langsung ketetapan tersebut, termasuk didalamnya HMI Cabang Jambi yang pada saat itu dipimpin oleh Saimun Sagito (1983-1985). Namun bukan hanya HMI saja yang didesak

menerima azas tunggal oleh pemerintah provinsi Jambi seluruh organisasi wajib menerimanya, kecuali PII yang menolak secara tegas azas tunggal (Wawancara dengan S. Sugito, 2019).

HMI XXII di Jambi mengalami berbagai dinamika yang luar biasa berakibat jatuhnya Orde Baru ke reformasi, salah satunya adalah kembalinya HMI DIPO berazaskan Islam dan terpilihnya Fakhruddin sebagai ketua umum PB HMI 1999-2001. Pada kongres HMI XXII dihadiri oleh segenap pejabat pemerintahan diantaranya Amien Rais (Ketua MPR), Menteri Kabinet, Gubernur Jambi Abdurrahman Sayuti, Gubernur terpilih Zulkifli Nurdin dan para pejabat pemerintah daerah Provinsi Jambi. (Wawancara dengan E.Andri, 2019)

Dinamika lain dari kongres ini yakni, tidak adanya dukungan dari pemerintah mengenai pelaksanaan kongres, berbagai rekomendasi yang disepakati di forum kongres hingga terjadinya dampak-dampak bagi HMI cabang Jambi. Maka penulis tertarik untuk medalami dialektika, faktor-faktor dan momen-momen yang terjadi ketika kongres HMI XXII. Penulis mengangkat judul “Momentum Islah HMI dalam Kongres XXII di Provinsi Jambi 1999”

KAJIAN TERDAHULU

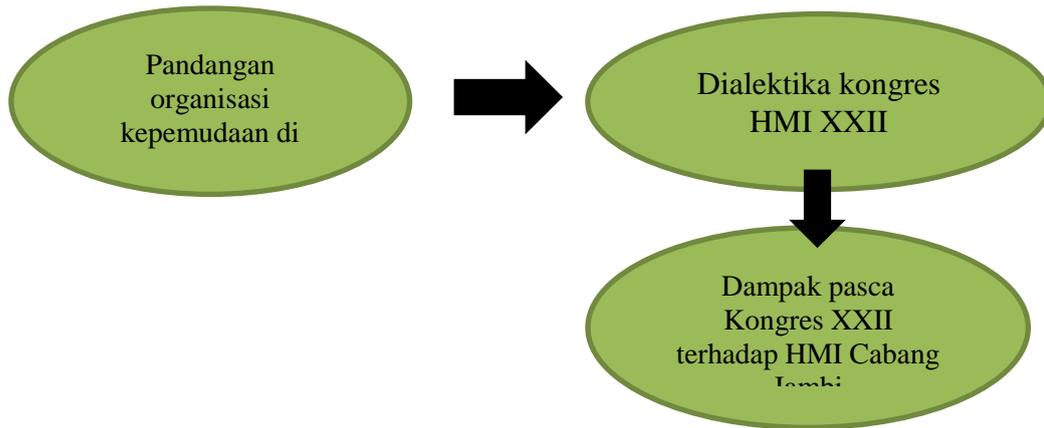
Pertama, Erlina Wahyu Eva Yanti, dalam skripsinya, “Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Padang dalam gerakan tahun 1998 di Kota Padang”. Dalam skripsinya Erlina membahas mengenai gerakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Sumatera Barat yang mendesak pemerintahan Soeharto untuk turun dari jabatan dan melakukan reformasi pada tahun 1998. HMI cabang Padang sangat aktif dalam menentang Orde Baru, seperti salah satunya adalah HMI cabang Padang melakukan aksi mimbar bebas di sekretariat HMI.

Kedua, Aldi Firahman, dalam Skripsinya, “Kongres HMI ke VIII 1966 di Surakarta pada masa transisi pemerintahan Indonesia”. Dalam skripsinya Aldi Firahman membahas mengenai kongres HMI VIII di Surakarta tahun 1966. Kongres VIII ini adalah kongres istimewa karena sebelum pelaksanaan Kongres VIII, HMI mengalami dialektika dalam pertarungan secara politik maupun fisik dengan PKI yang mendesak Soekarno membubarkan HMI dan terjadinya peristiwa gerakan 30 September oleh PKI. Pemerintahan Indonesia juga mengalami masa transisi dengan dikeluarkan Supersemar.

Ketiga, Rusdiyanto, dalam Skripsinya, “Perjuangan HMI MPO cabang Yogyakarta masa Orde Baru 1986-1998”. Dalam skripsinya Rusdiyanto menjelaskan mengenai kondisi HMI MPO terkhususkan di Yogyakarta pada masa Orde Baru yang dianggap sebagai “anak haram” karena tidak menerima pancasila sebagai azas. HMI Yogyakarta juga merupakan salah satu cabang yang menjadi pelopor dibentuknya HMI MPO di Indonesia yang dengan tegas menolak pancasila sebagai azas dan tetap menerapkan Islam sebagai azas.

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual merupakan bentuk dari kerangka berfikir yang menjelaskan tentang inti dari pemikiran atau menjelaskan hal-hal yang substantif dari penulisan ini. Penelitian yang berjudul “*Momentum Islah HMI dalam arena Kongres XXII di Cabang Jambi 1999*” ini menjelaskan tentang kondisi organisasi kepemudaan di Jambi dalam menanggapi azas tunggal, dialektika ketika kongres, serta dampak pasca dilaksanakannya kongres XXII HMI.



Bagan-bagan yang ada diatas menjelaskan proses konsolidasi ataupun persiapan HMI Cabang Jambi sebagai tuan rumah kongres XXII yang pada saat itu dilaksanakan di pleno 3 PB HMI di Bogor, dilanjutkan dengan kondisi ataupun momen-momen islah yang terjadi di forum Kongres XXII sampai kepada kondisi serta dampak kongres HMI terhadap Provinsi Jambi dan terkhususkan HMI Cabang Jambi.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian memuat desain penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data, pengumpulan data dan analisis data. Pada penelitian sejarah bagian metodologi berisi penjelasan spesifik mengenai tahapan metode penelitian sejarah (heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi/penulisan sejarah). Sedangkan pada penelitian pendidikan sejarah bagian metode berisi penjelasan tentang jenis penelitian (kuantitatif atau kualitatif), populasi-sampel/informan dan teknik pengambilan/pemilihannya, jenis data, teknik dan instrumen pengumpulan data dan cara menganalisis/memaknai data dalam kaitannya dengan masalah penelitian.

Di dalam melakukan pengumpulan sumber ini menggunakan metode sejarah yang mempunyai kaidah-kaidah tertentu dan pada prinsipnya penelitian adalah suatu proses yang berbentuk siklus bersusun dan berkesinambungan. Penelitian dimulai dari keingintahuan atau permasalahan, kemudian diteruskan dengan penelaan landasan teoritis dalam kepustakaan untuk mendapatkan jawaban sementara (hipotesis), kemudian dirancang dan dilakukan pengumpulan data(fakta) untuk menguji hipotesis melalui analisis data, sehingga diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan. Metode penelitian sejarah adalah metode atau cara yang digunakan sebagai pedoman melakukan penelitian peristiwa sejarah dan permasalahannya. Penulisan sebuah rangkaian peristiwa sejarah yang bersifat sistematis dan objektif maka perlu diperhatikan empat langkah utama dalam kegiatannya. Keempat langkah tersebut, pertama usaha mencari, mengumpulkan jejak atau sumber sejarah masa lampau, kedua usaha untuk meneliti jejak sejarah masa lampau secara kritis, ketiga menginterpretasikan hubungan fakta satu dengan fakta yang lain yang mewujudkan peristiwa tertentu, langkah keempat menyampaikan hasil rekonstruksi masa lalu melalui penulisan sejarah (Kuntowijoyo. 2015). Dalam mengkaji Momentum Islah HMI dalam arena kongres XXII di Cabang Jambi 1999, peneliti melakukan beberapa tahapan penelitian sebagai berikut:

A. Heuristik

Langkah pertama dalam penelitian ini ialah mengumpulkan sumber-sumber sejarah.(Daliman, 2012, hlm. 21). Sumber sejarah yang dikumpulkan adalah sumber yang peneliti anggap sebagai sumber primer untuk penelitian ini. Selain itu, peneliti juga

mengumpulkan Sekunder. Hal ini dilakukan secara terpisah agar dalam mengumpulkan sumber, peneliti tidak mengalami kebingungan dalam menggunakan sumber. Sumber-sumber yang di kumpulkan ialah beberapa karya peneliti terdahulu dalam bentuk skripsi, makalah dan artikel dan sumber wawancara dengan aktor dan pelaku kongres.

Sumber primer dalam penelitian ini adalah karya-karya terdahulu yang sudah diterbitkan berupa buku, artikel, dan jurnal. Sumber ini dijadikan sebagai sumber utama karena keterlibatan peneliti dalam mencari sumber belum mencapai maksimal, sehingga sumber yang didapatkan hanya sebatas karya penelitian terdahulu.

B. Kritik Sumber

Kritik yang dilakukan untuk mengetahui kualitas sumber yang didapatkan. Selanjutnya, sumber yang telah melalui tahapan kritik dapat dijadikan sebagai sumber utama atau tidak dengan melihat otentitas (keaslian) sumber. Hal ini dilakukan agar peneliti lebih teliti dalam menggunakan sumber. Dalam hal ini, peneliti berusaha melakukan kritik sumber yang peneliti temukan. Hal ini dilakukan karena sumber yang didapatkan lebih banyak hasil dari wawancara. Kritik Ekstern adalah upaya untuk menguji keaslian suatu sumber (Daliman, 2012). Dalam hal ini, peneliti mengkaji otentitas sumber yang ditemukan. Kritik Intern adalah upaya lebih jauh mengenai pedalaman sumber yang ditemukan, yakni lebih mempertanyakan informasi-informasi mengenai peristiwa sejarah. Dalam hal ini, peneliti lebih mendalami hasil penelitian yang memberikan informasi-informasi yang didapatkan dari buku-buku sebagai sumber (Abdurrahman, 2017, hlm. 70).

C. Interpretasi

Interpretasi adalah proses penyusunan antara satu fakta sejarah dengan fakta sejarah lain sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat dijadikan sebagai tulisan yang substansi. Setelah memilah data dan sudah memastikan data yang akan dijadikan sumber utama dan sumber pendukung, tahap selanjutnya adalah interpretasi. Tahap ini sangat penting dilakukan dalam penelitian sejarah, karena jika tahap ini tidak digunakan maka sejarah hanya disajikan dalam bentuk urutan peristiwa sejarah (Abdurrahman, 2017, hlm. 70).

Kemudian, peneliti juga dituntut untuk berusaha menanggapi pengertian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Sumber-sumber perlu dikonstruksi ulang sesuai dengan faktanya.

D. Historiografi

Setelah melakukan pengumpulan data, mengkritik serta analisa maka penulis menyajikan sejarah secara kronologis berdasarkan fakta historis dari hasil penelitian sejarah yang diungkapkan, diuji, dan ditafsirkan. Historiografi adalah tahap akhir dalam proses penyusunan skripsi, dengan menggunakan prinsip realisasi, kronologi, hubungan sebab akibat dan keterampilan imajinasi agar nantinya peneliti dapat merekonstruksi peristiwa sejarah Kongres XXII HMI di Jambi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Organisasi Kepemudaan Terhadap Azas Tunggal Di Jambi

a. HMI

Himpunan Mahasiswa Islam merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan tertua yang berdiri pada tanggal 05 Februari 1947, pada awal pendiriannya HMI sudah berasaskan Islam sehingga pada penetapan asas tunggal oleh pemerintah Orde Baru terjadilah dinamika yang luar biasa di HMI, berbagai macam pandangan dan tanggapan dari kader mengenai asas tunggal.

Menanggapi isu asas tunggal pancasila, HMI memberikan respon politik kontroversial. Pada kongres XV di Medan 1983, hampir semua peserta kongres menolak adanya asas tunggal

pancasila. Namun, ada beberapa cabang yang menerima asas tunggal diantaranya HMI cabang Jambi dan HMI cabang Surabaya (Wawancara dengan S. Sugito, 2019).

Kongres HMI XV di Medan menghasilkan keputusan HMI secara tegas dan institusional menolak keinginan pemerintah agar HMI mencatumkan asas tunggal Pancasila dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Pasca penolakan asas pancasila dalam kongres tersebut. HMI Jambi yang pada saat itu dipimpin oleh Saimun Sugito melakukan koordinasi dengan Gubernur Jambi Masjchun Sofwan dan sekretaris daerah Abdurrahman Sayoeti yang merupakan alumni HMI (KAHMI) (Wawancara dengan S. Sugito, 2019).

Pihak pemerintah daerah tetap bersikeras untuk HMI cabang Jambi menerima asas tunggal. Pasca penerimaan pancasila sebagai asas, Saimun Sugito dibekukan sebagai ketua umum HMI cabang Jambi oleh Pengurus Besar HMI. Sedangkan, pemerintah provinsi Jambi tetap menganggap Saimun Sugito sebagai ketua umum HMI cabang Jambi. Melalui MPK, PB HMI juga melakukan koordinasi pasca kongres di Medan hingga kongres di Padang, HMI berpandangan bahwa sanya asas tunggal tidak bertentangan dengan Islam dan HMI akan menerima asas tunggal pada kongres di Padang. HMI cabang Jambi sebenarnya tidak menerima dengan begitu saja, ini dibuktikan pada saat pembacaan deklarasi penerimaan asas, Saimun Sugito melarikan diri dalam pembacaan sumpah yang diupayakan oleh KNPI sehingga diwakili oleh wakil ketua Sulaiman (Wawancara dengan S. Sugito, 2019).

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan yang terakhir menerima asas tunggal, penerimaannya baru dilakukan pada saat kongres XVI di Padang pada tahun 1986 yang pada saat itu HMI cabang Jambi dipimpin oleh Samsul Huda. Namun, pada kongres ini bisa dikatakan hanya formalitas saja karena sebagian besar HMI se-provinsi sudah menerima asas tunggal. Pada kongres di Padang inilah terjadi perpecahan internal HMI yang mengakibatkan HMI dualisme yaitu Majelis Penyelamat organisasi (MPO) yang berpegang teguh terhadap asas Islam dan HMI Diponegoro (DIPO) yang beralih asas menjadi pancasila. (Wawancara dengan S. Huda, 2019).

b. PMII

Pada 22 Juli 1984 di Ciloto, PMII turut serta dalam musyawarah pimpinan paripurna komite nasional pemuda Indonesia (KNPI), saat itu PMII menyatakan menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi. Sebuah pernyataan yang monumental yang menempatkan aspek kebangsaan diatas solidaritas primordial lainnya, termasuk Islam (Hifni, 2026, hlm.78).

Pilihan pancasila sebagai asas tunggal organisasi ini menjadi komitmen PMII untuk memperteguh cara pandang kebangsaannya, sekaligus sebagai keseriusan PMII pada pematangan konsep negara yang lepas dari simbol-simbol Islam dalam struktur-struktur kekuasaan negara. Pada kongres PMII ke 8, asas pancasila dipertegas sebagai satu-satunya asas organisasi PMII dan tercantum bab II pasal 2 AD PMII. Sedangkan ideologi *Ahlusunnah wal Jamaah* yang awalnya merupakan asas PMII, diputuskan menjadi sebuah tujuan dan usaha.

Argumen penerimaan pancasila sebagai asas organisasi PMII ini mencakup dua hal sekaligus, *pertama*, argumen kebangsaan. Sikap ini mempertegas bahwa cara pandang PMII terhadap kebangsaan senantiasa dijalankan secara konsisten. PMII menolak terhadap wacana Negara Islam (*Islamic State*), PMII menolak terhadap keberadaan simbol-simbol Islam ke dalam struktur kekuasaan negara.

Kedua, argumen teologis, PMII menjadikan Islam sebagai akidah yang dipegang dalam landasan teologis, baik dalam tradisi keagamaan maupun dalam ruang gerakannya. PMII tidak membawa simbol-simbol atau gerakannya atas nama Islam dalam menempatkan para kadernya pada lembaga lembaga kekuasaan negara. Dengan demikian, asas pancasila tidak sedikitpun menggeser akidah *Ahlusunnah wal Jamaah* PMII (Hifni, 2026, hlm.79).

Pilihan asas organisasi ini merupakan komitmen PMII bahwa sejak awal berdirinya, PMII menempatkan komitmen kebangsaan diatas komitmen-komitmen lainnya, baik komitmen

primordial ataupun komitmen kebangsaan. Penerimaan asas pancasila ini juga disepakati oleh PMII dalam ruang lingkup Provinsi tanpa terkecuali PMII Provinsi Jambi.

c. PII

Pelajar Islam Indonesia (PII) merupakan organisasi pelajar tertua yang lahir setelah kemerdekaan Indonesia, bergerak dibidang sosial-pendidikan dan dakwah. PII didirikan di Yogyakarta tanggal 04 Mei 1947. Pembahasan mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah diantaranya mengenai asas tunggal PII melakukan empat kali pertemuan.

Pembahasan pertama dilakukan dalam Mukhtamar Nasional ke 16 di Jakarta 1983. Pembahasan kedua pada 1984 di Jawa Barat lewat rapat Pimpinan Nasional. Ketiga pada tahun 1985 melalui Musyawarah Instruktur Nasional di Bandar Lampung. Akhirnya, pada Mukhtamar Nasional ke 17 1986, PII mendapatkan kesepakatan diantaranya :

1. Menolak setiap perangkat atau hukum yang sengaja atau tidak sengaja akan mengeleminir atau mencoret Islam secara tersirat atau tersurat dari AD atau perangkat organisasi kemasyarakatan, terutama yang bernafaskan Islam.
2. Mengakui Islam sebagai satu-satunya asas bagi organisasi yang bernafaskan Islam dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan.

Sejak saat itulah legalitas formalitas PII sebagai organisasi kemasyarakatan tidak diakui lagi. Sejak itu pula sesungguhnya PII sebagai organisasi kelembagaan telah berada diluar kerangka politik formal Orde Baru. Namun terjadi keunikan terhadap hubungan Orde Baru dan PII, pengurus dan kader PII tidak mau menganggap organisasinya ilegal karena terbukti seluruh kegiatan tetap dilaksanakan sebagaimana sebelumnya.

Penolakan ini juga terjadi diseluruh Cabang PII se-Provinsi tanpa bahkan untuk penekanan terhadap kader PII, TNI melakukan operasi pencarian terhadap seluruh kader PII yang mengakibatkan hubungan panas antara pemerintahan Orde Baru dan PII (Wawancara dengan Anra, 2020).

Pada tahun 1995 melalui Mukhtamar nasional PII ke 20 di Cisalopa, Jawa Barat. PII secara kompak berketetapan hati untuk menerima asas tunggal Pancasila. Alasan yang dikemukakan adalah,

- 1) Pancasila bagi umat Islam dan PII sudah tidak perlu dipermasalahkan
- 2) Mengingat kondisi obyektif para pelajar, maka PII perlu mengoptimalisasikan perannya hal ini tidak mungkin dilakukan tanpa memakai jalur formal (Hasil Mukhtamar Nasional PII ke XX, 1995)

B. Dialektika Kongres HMI XXII

a. Titah Perjuangan HMI

Ada membagi empat faktor yang melatarbelakangi berdirinya HMI. Pertama adalah situasi dunia internasional. Pada saat itu muncullah apa yang dinamakan gerakan pembaruan. Gerakan ini ingin menentang keterbatasan seseorang melaksanakan ajaran Islam secara benar dan utuh. Gerakan ini ingin mengembalikan ajaran Islam kepada ajaran yang totalitas, yaitu bahwa Islam bukan hanya terbatas pada hal-hal yang sakral saja, melainkan juga merupakan pola kehidupan manusia secara keseluruhan.

Kedua adalah situasi Indonesia, imperialisme barat mempunyai dampak kepada tiga hal yaitu, penjajahan itu sendiri dengan berbagai bentuk implikasinya, Missi dan Zending agama Kristiani dan peradaban barat dengan ciri sekularisme dan liberalismenya. Dampak-dampak inilah yang ingin coba dibenahi oleh HMI.

Ketiga adalah kondisi umat Islam di Indonesia. Para pendiri HMI beranggapan kondisi umat Islam di Indonesia terbagi menjadi empat golongan. Golongan pertama adalah umat yang

melakukan ajaran Islam sebagai kewajiban yang diadatkan seperti perkawinan, kematian serta kelahiran. Golongan kedua adalah golongan yang mengenal dan mempraktekkan ajaran Islam sesuai yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW. Golongan ketiga adalah yang terpengaruh oleh mistikisme dan golongan keempat adalah golongan kecil yang menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman.

Keempat adalah kondisi perguruan tinggi dan dunia kemahasiswaan. Pada saat itu, sebelum HMI berdiri, ada dua faktor yang dirasakan sangat dominan mewarnai kondisi perguruan tinggi dan dunia kemahasiswaan. Pertama yaitu sistem pendidikan yang diterapkan terutama di perguruan tinggi adalah sistem pendidikan barat yang mengarah pada sekularisme. Kedua yaitu adanya perserikatan Mahasiswa Yogyakarta dan Serikat Mahasiswa Indonesia yang keduanya organisasi dibawah pengaruh komunis. Sehingga menyebabkan timbulnya krisis keseimbangan. HMI berdiri pada tanggal 05 Februari 1947. Diprakarsai oleh Lafran Pane bersama teman-temannya (Sitompul, 2008, hlm 8).

Kongres HMI XXII di Jambi pada tahun 1999 merupakan kongres setelah terjadinya Reformasi atau turunnya Soeharto sebagai Presiden setelah 32 tahun kepemimpinannya. Pada kongres ini terjadi berbagai hal-hal yang menarik, diantaranya adalah kembalinya HMI kepada asas Islam yang sebelumnya pada masa pemerintahan Orde Baru beralih menjadi Pancasila. Tentunya dengan tumbangannya pemerintahan Orde Baru menjadi kemerdekaan bagi mahasiswa karena sebelumnya mahasiswa dikekang dengan pembatasan gerakan dalam penyampaian aspirasi. Namun pada saat pasca reformasi mahasiswa sudah bisa berkontribusi lebih banyak untuk negara kesatuan Republik Indonesia.

b. Dialektika Kongres XXII

Sejak tahun 1997 pada saat kongres HMI di Yogyakarta, HMI cabang Jambi sudah mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah kongres, dibuktikan dengan pengiriman peserta kongres sebanyak 50 orang untuk belajar mengenai kondisi kongres. Pada kongres di Yogyakarta ini terpilihlah Anas Urbaningrum sebagai ketua umum HMI 1997-1999. Pada masa kepengurusan Anas Urbaningrum satu-satunya kader HMI cabang Jambi yang masuk kepengurusan adalah Aswan Zahari. Dialah merupakan salah satu sosok yang memperjuangkan HMI cabang Jambi sebagai tuan rumah kongres ke XXII di Jambi (Wawancara dengan Sanusi, 2019).

Proses ditunjuknya HMI cabang Jambi sebagai tuan rumah, dimulai ketika rapat kerja HMI cabang Jambi masa pengurusan Aswan Zahari 1996-1997 kader sepakat untuk mewujudkan HMI cabang Jambi sebagai tuan rumah kongres dan ini mendapatkan respon yang baik dari BADKO SUMBAGSEL yang menaungi HMI cabang Jambi. Barulah pada pelaksanaan kongres di Yogyakarta saat rekomendasi tempat kongres, akhirnya HMI cabang Jambi menjadi salah satu calon tuan rumah kongres selanjutnya dan satu-satunya perwakilan dari Sumatera. Ini menjadi kekuatan tersendiri bagi HMI cabang Jambi, karena tentunya akan mendapatkan dukungan dari seluruh cabang se-Sumatera.

Pada pelaksanaan pleno 3 Pengurus Besar HMI yang dilaksanakan di Puncak Bogor yang dihadiri oleh seluruh perwakilan BADKO se-Indonesia ditentukanlah tuan rumah kongres sesuai rekomendasi pada saat kongres di Yogyakarta. Ada 4 cabang yang menyatakan kesiapannya sebagai tuan rumah kongres, diantaranya HMI cabang Balikpapan, HMI cabang Makassar, HMI cabang Mataram dan HMI cabang Jambi.

Penunjukan HMI cabang Jambi sebagai tuan rumah kongres tidak semerta-merta berjalan lancar, karena cabang Jambi tidak mendapat dukungan dari pemerintah daerah yang pada saat itu gubernurnya Abdurrahman Sayoeti, diakibatkan tidak sinergitas antara HMI cabang Jambi dengan Pemerintah daerah masa itu. Tidak hilang arah HMI cabang Jambi tetap memperjuangkan untuk menjadi tuan rumah, apalagi mendapatkan dukungan dari BADKO SUMBAGSEL dan HMI cabang se-Sumatera. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan dan sesuai hasil pleno 3 PB HMI, ditunjuklah HMI cabang Jambi sebagai tuan rumah kongres ke

XXII. Dinamika yang terjadi tidak sampai disitu, detik-detik akan dilaksanakannya kongres cabang Jambi belum juga mendapatkan dukungan dari pemerintah. Namun, dengan semangat dari pengurus cabang dan panitia akhirnya H-3 pemerintah akhirnya luluh dan memberikan dukungan kepada HMI cabang Jambi, dengan alasan kongres ini tidak hanya membawa nama baik HMI cabang Jambi namun juga membawa nama baik Provinsi Jambi (Wawancara dengan A. Zahari, 2019).



Gambar 1: Kondisi Pelaksanaan Kongres XXII

Sumber: Koleksi pribadi Rahmad Hidayat (Panitia Pelaksana Kongres)

Kongres XXII HMI ini dinamakan sebagai kongres Milenium karena kongres ini adalah sebuah gerakan pembaharu setelah jatuhnya rezim pemerintahan Orde Baru dengan dibuktikan kembalinya Islam sebagai azas dan beberapa rekomendasi untuk Indonesia yang pada saat itu di pimpin oleh Abdurrahmah Wahid. Kongres ini dilaksanakan di Gedung Pemuda, Kota Jambi dengan tema “*Memperkokoh etika dan solidaritas bangsa dan menegakkan kedaulatan rakyat menuju masyarakat madani*” yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1999-31 Desember 1999 yang dihadiri oleh seluruh perwakilan BADKO dan HMI cabang se-Indonesia, ketua MPR RI Amien Rais, beberapa Menteri, Abdurrahman Sayoeti (Gubernur Jambi), Zulkifli Nurdin (Gubernur Jambi terpilih), KAHMI, dan tamu undangan lainnya (Wawancara dengan Sanusi, 2019)

Pada Kongres XXII termaktublah beberapa rekomendasi untuk menyelaraskan kebijakan pemerintahan dengan HMI itu sendiri, adapun rekomendasi kongres XXII adalah sebagai berikut.
BIDANG IDEOLOGI

Dalam sejarah negara kesatuan RI Pancasila sebagai ideologi negara selama kurang lebih setengah abad telah menjadi payung yang cukup efektif dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Namun pada masa orde baru pancasila seringkali digunakan sebagai instrumen politik oleh penguasa untuk tetap menjaga eksistensi kekuasaannya. Lebih ironisnya lagi bahwa pancasila seringkali dipertentangkan dengan ideologi lain atau bahkan agama. Fenomena inilah kemudian muncul larangan menggunakan Islam, Kristen, Marhaenisme, nasionalisme atau ideologi-ideologi lainnya bagi penggunaan asas yang juga dirasakan oleh HMI. (Draf Kongres XXI HMI, 1999, hlm, 29).

Sehingga pada kongres XXII, HMI merekomendasikan beberapa pemikiran mengenai pancasila dalam menyelaraskan kembali eksistensi pancasila sebagai ideologi negara antara lain:

“Pertama, bahwa negara sudah seharusnya tidak lagi menjadi penafsir tunggal terhadap ideologi pancasila sehingga pancasila mempunyai ruang yang cukup luas untuk mendapatkan penafsiran dari rakyat. Sebagai ideologi terbuka pancasila harus mendapatkan penafsiran yang dinamis sesuai dengan ruang dan waktu, sehingga fungsi-fungsi praktis dari ideologi pancasila dapat diimplementasikan sehingga pancasila menjadi tetap *up to date*. Kedua, adanya kebebasan untuk menjadikan ideologi sebagai asas bagi partai-partai politik atau institusi kemasyarakatan lainnya haruslah dimaknai sebagai proses desakralisasi terhadap pancasila tanpa menafikkan keberadaannya sebagai ideologi negara. Ketiga, masyarakat perlu menyadari bahwa pancasila sebagai sebuah

ideologi negara yang merupakan puncak prestasi intelektual cendekiawan Indonesia hendaknya dapat dijadikan sebuah kesadaran bersama untuk menjadi perekat diantara komponen negara yang sangat beragam dan plural” (Draf Kongres XXI HMI, 1999, hlm, 30).

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

“Pertama, implementasi semangat otonomi daerah yang seluas-luasnya dan melakukan reformulasi terhadap bentuk NKRI. Kedua, kabinet persatuan nasional harus segera menunjukkan kinerja terbaiknya dan menghindari kebijakan-kebijakan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat sebagai contoh pembubaran beberapa departemen yang belum tersosialisasikan argumentasinya dan tidak jelas penyelesaiannya. Ketiga, mendesak kepada kekuatan reformasi untuk terus menerus mengkonsolidasikan diri menjadi kekuatan oposisi permanen sebagai kontrol terhadap kemungkinan adanya penyimpangan pemerintahan dibawah kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid. Memberikan ruang publik yang cukup luas bagi adanya kritik dan kontrol masyarakat. Keempat, pemberian kursi pada TNI di DPR/MPR dan porsi yang relatif besar di kabinet hendaknya tidak diikuti upaya untuk reposisi pada makin kuatnya peran sosial politik TNI, oleh karenanya TNI harus konsisten kepada semangat reformasi dan demokratisasi yang hendaknya TNI untuk lebih profesional dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kelima, demi tetap terjaganya keutuhan wilayah negara Indonesia, mendesak pemerintah dan pihak yang berwenang untuk segera menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan negara terhadap rakyat dan pelanggaran HAM lainnya. Keenam, agar terhindar dari kecelakaan-kecelakaan politik orde lama dan orde baru presiden harus proporsional melaksanakan kewenangannya dan memberikan peluang bagi lembaga tinggi negara lainnya seperti DPR, MA, BPK, dan DPA untuk eksis secara nyata tanpa intervensi kekuatan presiden (Draf Kongres XXI HMI, 1999, hlm, 32)”.

BIDANG POLITIK LUAR NEGERI

“Pertama, makan perjuangan politik luar negeri Indonesia harus ditempatkan pada upaya untuk menciptakan keseimbangan dunia baru dan menempatkan Indonesia sebagai perjuangan dalam kesimbangan dunia baru. Kedua, kondisi buruknya ekonomi negara-negara berkembang sebagai suatu kondisi diciptakan guna terwujudnya kelangsungan kolonialisasi baru perlu dicegah dengan keikutsertaan Indonesia dalam organisasi perdagangan dunia (WTO) dan bentuk kerjasama lainnya baik regional maupun internasional. Ketiga, makna *New World Order* (keteraturan dunia baru) harus dipersepsikan sama oleh semua negara. Keempat, resutrukturisasi PBB dalam mewujudkan perdamaian dunia, tidak semata-mata menjadi alat kepentingan negara *super power*. Kelima, Australia sebagai negara tetangga Indonesia yang dibatasi oleh laut harus menunjukkan itikad baik untuk menjadi tetangga yang baik dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.”(Draf Kongres XXI HMI, 1999, hlm, 34).

BIDANG EKONOMI

“Pertama, untuk memperkuat fondamen perekonomian nasional fokus pembangunan ekonomi haruslah diarahkan pada basis utama yang menggerakkan kehidupan rakyat, yaitu dibidang pertanian dan maritim. Kedua, mendesak dewan moneter untuk segera menstabilkan realitas ekonomi nasional. Hal yang paling penting adalah menstabilkan nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi sektor riil yang berhubungan langsung dengan rakyat banyak, memperluas lapangan kerja untuk tidak memberikan implikasi yang cukup luas pada daya ekspansi dari besarnya tingkat pengangguran. Ketiga, mendesak kepada pemerintahan baru untuk

segera merehabilitasi perekonomian nasional dengan meluruskan kembali kebijakan dan strategi ekonomi yang berbasis rakyat bukan pada konlomerat sehingga mampu memperkuat fondamen perekonomian nasional. Keempat, optimalisasi dari eksplorasi sumber daya alam dan oemanfaatan sumber-sumber alternatif menjadi hal yang sangat penting bagi penguatan sumber devisa dan pemulihan perekonomian nasional.” (Draf Kongres XXI HMI, 1999, hlm, 36).

BIDANG HUKUM DAN HAM

“Pertama, proses legislasi hukum nasional hendaknya tidak hanya diukur secara kuantitatif sebagaimana yang terjadi selama pemerintahan Habibie. Dalam kurun waktu yang singkat reformasi hukum telah berjalan secara revolusioner dalam memproduksi berbagai produk hukum akan tetapi ada produk hukum yang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, dalam melakukan reformasi hukum hendaknya diarahkan kepada substansiasi hukum yang hanya sebatas mengatur batas-batas margin masyarakat dan membiarkan berfungsinya sebagaimana standar masyarakat serta memberikan peluang berlakunya potensi, kreatifitas buaya kedaerahan. Ketiga, independensi lembaga peradilan harus segera diwujudkan dengan peningkatan kualitas dan terjadinya supremasi moral dalam diri aparat hukum. Keempat, dalam menunjang proses penegakkan hukum khususnya kasus-kasus perdata harus segera diberdayakan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dan segera dibangun badan-badan khusus. Kelima, demi terciptanya kepastian hukum dimasyarakat dan terhindarnya jurisprudensi negatif, maka berbagai pelanggaran kasus HAM dan pengadilan mantan presiden Soeharto, kasus bang Bali harus segera diungkap dan diberikan kekuatan yuridis yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan tidak diskriminatif. Keenam, untuk menunjang demokratisasi harus diciptakan lembaga peradilan independen yang memiliki hak untuk meninjau apakah suatu hukum sudah sejalan dengan konstitusi, penyebarluasan permasalahan dan pengumpulan pendapat.” (Draf Kongres XXI HMI, 1999, hlm, 38).

BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

“Pertama, sudah sepatutnya negara tidak lagi menghegemoni proses interaksi sosial masyarakat. Bahwa ditengah kemajemukan dan keberagaman perlu dibangun kesadaran bersama akan pluralisme. Kedua, perlunya membangun toleransi yang lebih sehat, tidak semu seperti yang selama ini berlangsung. Oleh karenanya berbagai persoalan yang berkaitan dengan SARA sudah seharusnya dapat dibicarakan secara luagas dan lebih transparan. Ketiga, kasus-kasus sosial seperti makin maraknya pemakaian narkoba oleh generasi muda memerlukan penanganan yang tidak saja pada penguatan etika dan norma-norma sosial lainnya yang berdimensi kultural tetapi yang lebih penting adalah penanganan melalui dimensi struktural dan penegakan hukum beserta sanksinya secara lebih keras dan tegas. Keempat, dalam rangka pengembangan budaya Indonesia, perlu kiranya untuk menghapus dikotomi kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah. Bahwa kebudayaan Indonesia adalah seluruh kebudayaan yang tumbuh dalam masyarakat.” (Draf Kongres XXI HMI, 1999, hlm, 40).

BIDANG KEMAHASISWAAN DAN KEPEMUDAAN

“Pertama, bahwa gerakan mahasiswa sebagai simbol moral haruslah mampu membangkitkan kesadaran seluruh warga bangsa untuk menolak ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan tirani dari sebuah rezim yang berkuasa. Oleh karenanya seluruh gerakan mahasiswa haruslah senantiasa dilandasi oleh idealisme, etika dan moralitas serta sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat. Kedua, sudah menjadi keharusan sejarah bahwa gerakan mahasiswa dilahirkan untuk senantiasa menjadi

kekuatan pengontrol dari kekuasaan yang tengah dijalankan. Oleh karenanya tidak berlebihan apabila gerakan mahasiswa menjadi oposisi permanen ditengah budaya oposisi yang relatif masih cukup lemah. Apalagi kecenderungan pemerintahan baru dibawah presiden KH Abdurrahman Wahid tidak memberikan ruang bagi partai politik untuk menjadi oposisi. Ketiga, gerakan mahasiswa haruslah tetap berbasiskan kampus dengan tradisi akademisnya, menghindarkan bentuk-bentuk kekerasan dan sedapat mungkin haruslah berdiri diatas idealisme mahasiswa dan tidak partisipan. Keempat, berkaitan dengan institusi kepemudaan sudah saatnya negara tidak kembali melakukan proses-proses korporatisme atau pewadahan tunggal institusi kepemudaan untuk selanjutnya digunakan sebagai kepanjangan tangan penguasa untuk menghegemoni kalangan pemuda. Oleh karenanya KNPI sebagai satu-satunya wadah berhimpun bagi organisasi kepemudaan haruslah ditinjau ulang eksistensinya dan memberikan kesempatan bagi lahirnya institusi serupa untuk menampung aspirasi pemuda Indonesia.” (Draf Kongres XXI HMI, 1999, hlm, 41).

Tidak hanya rekomendasi secara umum untuk kondisi kenegaraan, namun di Kongres XXII HMI juga merekomendasi secara khusus mengenai perubahan dari azas pancasila ke azas Islam. Karena HMI sadar akan kewajiban dasarnya sebagai organisasi yang senantiasa konsisten menegakkan nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan, serta disadari tanggung jawab sebagai pilar demokratisasi menuju masyarakat madani maka melalui kongres ke 22 di Jambi, dilakukanlah beberapa perubahan konstitusional yang tertuang dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan pedoman pengkaderan.

Selain menetapkan perubahan azas dari pancasila ke Islam dan memberikan rekomendasi-rekomendasi demi ke-Indonesiaan dan ke-ummatan. Kongres HMI ke XXII di Jambi juga mendapatkan keputusan-keputusan lainnya, diantaranya terpilihnya Fakhruddin sebagai ketua umum HMI menggantikan Anas Urbaningrim. Dinamika dalam pemilihan ketua umum tidak kalah panas dengan proses penetapan-penetapan lainnya. Muncul beberapa nama yang menjadi kandidat untuk calon ketua umum PB HMI diantaranya, Fakhruddin Muhandi dari cabang Aceh, Viva Yoga Mauladi cabang Denpasar, Taruna Ikrar dari cabang Makassar, Ahmad Doli Kurnia dari Cabang Bandung.



GAMBAR 2: Kandidat Formatur

Sumber: Koleksi pribadi bapak Rahmad Hidayat (panitia pelaksana kongres)

Dinamika yang terjadi pada saat pemilihan ketua umum adalah terjadinya sektor-sektor yang mendukung masing-masing kandidat. Namun Fakhruddin mendapatkan keuntungan dengan mundurnya Ahmad Doli Kurnia sebagai kandidat kongres, sehingga pada saat itu HMI cabang se-Sumatera memberikan dukungan penuh kepada Fakhruddin. Akhirnya dengan dukungan dari HMI se-Sumatera dan cabang lainnya terpilihlah Fakhruddin sebagai ketua umum HMI periode 1999-2001 (Wawancara dengan A.Zahari. 2019).



GAMBAR 3: Formatur Terpilih

Sumber: Koleksi pribadi Rahmad Hidayat (Panitia pelaksana Kongres).

C. Dampak Pasca Kongres XXII Untuk HMI Cabang Jambi

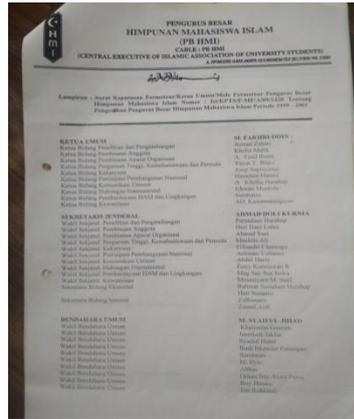
Kongres XXII HMI di Jambi mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap Indonesia masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, banyak rekomendasi-rekomendasi yang diberikan HMI baik secara perkembangan ekonomi, ideologi, hukum maupun gambaran perpolitikan di Indonesia. Namun, tidak hanya dampak terhadap Indonesia saja, kongres HMI ke XXII di Jambi memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap HMI cabang Jambi.

Sebelum pembahasan dampak apa saja yang terjadi terhadap HMI cabang Jambi pasca Kongres XXII. Adapun yang dimaksud dengan dampak menurut KBBI, dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang/benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dampak sosial dapat berasal dari internal dan eksternal masyarakat atau lembaga itu sendiri. Dampak internal adalah dampak yang disebabkan karena faktor dari dalam masyarakat atau lembaga itu sendiri, sementara dampak eksternal adalah dampak yang berasal dari luar masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditemukan beberapa dampak yang terjadi terhadap HMI cabang Jambi pasca dari kongres XXII baik secara internal maupun eksternal, positif maupun negatif. Kongres XXII di Provinsi Jambi tahun 1999, mengalami dampak yang signifikan terhadap HMI cabang Jambi, terutama bagi internal HMI. proses pengkaderan HMI di Jambi mengalami peningkatan yang luar biasa, banyak diantara mahasiswa/i di Jambi tertarik untuk bergabung dengan HMI. sehingga HMI cabang Jambi semakin dikenal dikalangan mahasiswa.

Bagi kader HMI cabang Jambi juga merasakan dampak dari terlaksananya Kongres XXII di Jambi, banyak diantara mereka akhirnya kembali aktif di HMI yang sebelumnya sempat vakum (tidak aktif). Pembelajaran yang luar biasa bagi anggota HMI cabang Jambi, sebelumnya belum pernah melaksanakan kegiatan yang besar di Jambi. Bahkan beberapa kader HMI cabang Jambi masuk dikepengurusan PB HMI dan mendapatkan posisi yang strategis, seperti Aswan Zahari sebagai kepala bidang di PB HMI (Wawancara A.Zahari, 2019).

Berikut Surat keputusan Pengurus Besar HMI tentang personalia kepengurusan PB HMI periode 1999-2001.(SK No 14/A/Sek/HMI/K.Sy/05/1420, tentang Rekomendasi Personalia Panitia Besar Kongres HMI).



Surat Keputusan(SK) Kepengurusan PB HMI periode 1999-2000.
Sumber: Koleksi arsip HMI Cabang Jambi

HMI cabang Jambi akhirnya tidak dicap lagi sebagai pemecah dari HMI, karena pada penetapan azas tunggal, HMI Cabang Jambi merupakan salah satu cabang yang menerima langsung penetapan azas tunggal. Akibatnya adalah terjadinya dualisme kepengurusan PB HMI. Namun, ketika selesainya pelaksanaan kongres XXII, HMI cabang Jambi di anggap sebagai fasilitator kembalinya kejayaan dari HMI yang sempat tergerus oleh pemerintahan Orde Baru.

Di samping dampak-dampak positif, kongres XXII juga mengakibatkan dampak yang negatif bagi HMI cabang Jambi. Hal ini dirasakan oleh pengurus HMI cabang Jambi, hutang kongres kepada berbagai pihak yang dilakukan oleh peserta kongres yang harus ditanggung oleh tuan rumah kongres. Sehingga pengurus HMI cabang Jambi mengalami disintegritas dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Beruntungnya PB HMI juga ikut bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

Selain itu hubungan pemerintah provinsi Jambi dengan HMI cabang Jambi akhirnya kembali bersinergi dengan baik, yang sebelumnya sempat bersitegang dengan tidak adanya dukungan dari pemprov akan pelaksanaan kongres XXII di Jambi. Pada saat itu pemerintahan provinsi Jambi mengalami peralihan dari bapak Abdurrahman Sayoeti ke bapak Zulkifli Nurdin.

Disamping dampak internal bagi HMI cabang Jambi, kongres XXII HMI juga berdampak secara eksternal bagi HMI. pasca pelaksanaan kongres XXII HMI dibawah pimpinan Fakhruddin terus berupaya untuk berkonsolidasi dengan HMI MPO untuk menyatukan HMI. Namun, mendapatkan sebuah kegagalan karena ada beberapa sudut pandang yang berbeda dari kedua belah pihak.

Kongres ini menandakan sebuah reformasi bagi seluruh elemen kemahasiswaan, dikarenakan kembalinya kebebasan dalam berfikir dan berpendapat. Seperti diketahui pada masa pemerintahan Orde Baru, mahasiswa dikekang dan dibatasi dalam menyampaikan pandangan bagi pemerintah. HMI mencoba menguatkan hubungan sinegritas dengan pemerintahan untuk Indonesia yang lebih baik kedepannya. Pada saat itu Indonesia dipimpin oleh Abdurrahman Wahid dan Megawati.

Disamping dampak politik, kongres ini juga berdampak serius bagi ekonomi di Jambi. Ketika pelaksanaan kongres, pertumbuhan ekonomi meningkat drastis. Karena banyak wisatawan baik nasional maupun internasional ke Jambi, baik yang ikut menyaksikan kongres maupun hanya berwisata di Jambi. Para pedagang di Jambi juga mengalami pelonjakkan yang signifikan, karena tentunya banyak peserta kongres yang berbelanja di sekitaran lokasi kongres.

SIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan diatas dapat disimpulkan beberapa hal, Penetapan azas tunggal yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru menjadi dinamika tersendiri bagi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang mengakibatkan HMI terpecah menjadi dua kepengurusan yaitu HMI DIPO yang berazaskan Pancasila dan HMI MPO yang berazaskan Islam. Penerimaan azas tunggal pada saat kongres di Padang tahun 1986 menjadi dinamika panjang bagi HMI, hingga akhir tahun 1998 dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru.

Penetapan azas tunggal tidak hanya berefek kepada HMI namun juga kepada seluruh organisasi kemahasiswaan lainnya. Berbagai pandangan dari organisasi kemahasiswaan, ada yang menerima akibat desakan politik dan ada yang menolak secara tegas mengenai asas tunggal tersebut. Pada kongres XXII di cabang Jambi inilah, HMI kembali kepada azas pertamanya yaitu Islam. Kongres ini sendiri dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1999-31 Desember 2019 yang dihadiri berbagai tokoh nasional diantaranya Amien Rais (Ketua MPR RI), beberapa menteri, Gubernur Jambi Abdurrahman Sayoeti, Zulkifli Nurdin (Gubernur Jambi terpilih), KAHMI, dan tamu undangan lainnya. Kongres ini mengangkat tema “Memperkokoh etika dan solidaritas bangsa dan menegakkan kedaulatan rakyat menuju masyarakat madani”.

Kongres XXII ini terpilihlah Fakhruddin sebagai ketua umum menggantikan Anas Urbaningrum yang menjabat sejak tahun 1997. Kongres ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi baik secara kebutuhan kemahasiswaan dan pemuda maupun rekomendasi bagi pemerintahan Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh Abdurrahman Wahid. Berbagai rekomendasi diberikan pada saat kongres XXII, diantaranya mendesak pemerintah untuk kembali menempatkan mahasiswa sebagai bagian penting dalam pembangunan dan pengontrol dari pemerintah yang pada saat masa Orde Baru dibatasi pergerakannya. Pasca kongres XXII, HMI cabang Jambi mendapatkan dampak, baik positif maupun negatif bagi cabang Jambi itu sendiri maupun bagi Provinsi Jambi. Diantaranya adalah beberapa kader HMI Cabang Jambi masuk dalam kepengurusan PB HMI. Semakin dikenalnya provinsi Jambi sebagai bagian penting dalam pembangunan Indonesia dan hal lain sebagainya

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak Elfi Andri, Saimun Sugito, Azwan Zahari, Sanusi Zein, Jefri Hendrik, Aji Suhatman, Yulius Nur, Samsul Huda yang telah bersedia menjadi informan selama penulisan melakukan penelitian, Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pengelola jurnal RanahSejarah yang telah membantu menyempurnakan artikel ini sampai dipublikasi. Semoga memberi manfaat dan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Arsip

PB HMI, buku C Draft Kongres XXII HMI

PB HMI, Undangan Peserta Kongres ke-22 HMI tahun 1999 Nomor 1453/A/Sek/07/1420

Sumber Buku

Sitompul, A (2008). *Sejarah Perjuangan HMI*. Yogyakarta: CV Misaka Galiza.

Abdurrahman, D (2007). *Metodologi Penelitian Sejarah* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Daliman, A. (2012). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak

Saleh, H.M. (1996), *HMI dan Rekayasa Azaz Tunggal*.

Kuntowijoyo, (2003). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: UGM Press

Notosusanto, N. (1984), *Masalah Penelitian Kontemporer (Suatu Pengalaman)*”. Jakarta: PT Idayu Press

Muniruddin, S, (2014). *Bintang Arasy, Tafsir Filosofis-Gnostik Tujuan HMI*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press

Sumber Jurnal

Aisyaah, V. Y, (2014). *Peran Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Surabaya Dalam Penerimaan Asas Tunggal Pancasila Berdasar Sumber Lisan Para Kader*. AVATAR, *e-Journal Pendidikan Sejarah*, vol 2, no 1.

Sumber Skripsi

Erlina Wahyu Eva Yanti, “*Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Padang dalam Gerakan Tahun 1998 di Kota Padang*”.

Rusdiyanto, (2013), “*Perjuangan HMI MPO Cabang Yogyakarta Masa Orde Baru : 1986-1998*”, SKRIPSI (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga),

Hifni, A, (2016) “*Menjadi Kader PMII*”, *Moderate Muslim Society (MMS)*,Tangerang,

Firahman, A, “*Kongres HMI ke VIII 1966 di Surakarta pada Masa Transisi Pemerintahan Indonesia*”.

Sumber Wawancara

Aswan Zahari (Ketua pelaksana Kongres XXII PB HMI)

Elfy Andri (Sekretaris Pelaksana Pleno 3 Pengurus Besar HMI)

Hengky Tornado (Ketua umum PMII Provinsi Jambi)

Saimun Sugito (Ketua Umum HMI Cabang Jambi 1983-1985)

Sanusi (Ketua umum HMI Cabang Jambi 1998-1999)

Samsul Huda (Ketua umum HMI cabang Jambi 1985-1987)

Yusdi Anra (Aalumni PII)